

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Abstrak	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinilitas Studi	13
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	52

BAB II : POLITIK HUKUM PENDELEGASIAN WEWENANG LEGISLASI (*DELEGATED LEGISLATION*) DI BIDANG PRODUK HUKUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH

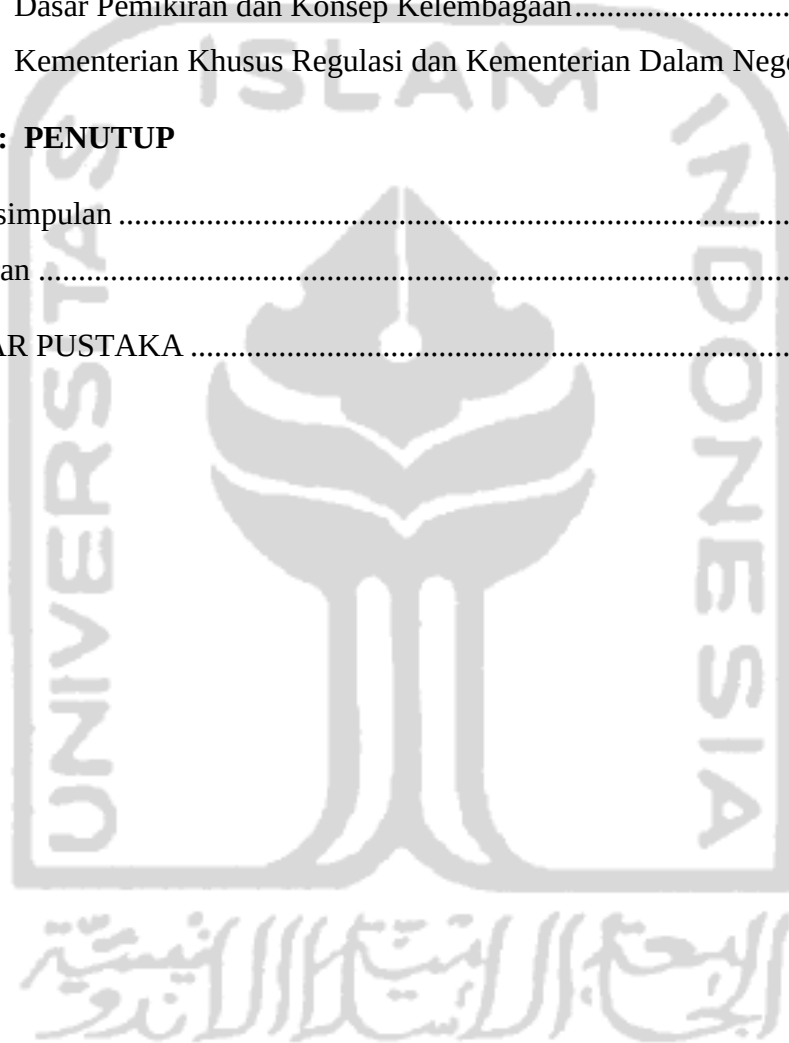
A. Sistem Norma dan Penjenjangan Norma Hukum di Indonesia	60
1. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Delegasi Menurut UUD 1945 Setelah Reformasi	78

2. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Delegasi Menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	113
3. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Delegasi Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	123
4. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Delegasi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	129
5. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Delegasi Bidang Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah.....	145
B. Dinamika dan Masalah Peraturan Delegasi Bidang Pemerintah Daerah.....	153
1. Tarik Ulur Sistem Presidensialisme Multipartai.....	164
2. Tidak Terkoneksinya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	172
3. Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Dari Desentralisasi Menjadi Sentralistik	186
4. Pengaruh Dekonsentrasi Urusan, Relasi Horizontal dan Vertikal Antara Kementerian di Pusat dan Daerah.....	236
5. Sinkronisasi Undang-Undang Sektoral Dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.....	240
6. Problematika Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri	242

BAB III: DESAIN KONSEP PENDELEGASIAN WEWENANG LEGISLASI (*DELEGATED LEGISLATION*) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (<i>Delegated Legislation</i>)	248
1. Mendudukan Konsep Peraturan Delegasi.....	249

2. Gagasan Asas Preferensi Pendelegasian Wewenang Legislasi (<i>Delegated Preferences Legislation</i>) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	263
3. Arah Penempatan dan Penggunaan Peraturan Delegasi	281
B. Kelembagaan Penataan Peraturan Delegasi	286
1. Dasar Pemikiran dan Konsep Kelembagaan	287
2. Kementerian Khusus Regulasi dan Kementerian Dalam Negeri	290
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	295
B. Saran	298
DAFTAR PUSTAKA	300



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Regulasi yang terbit pada 2000-2015.....	5
--	---

Tabel 1.2

Perbedaan <i>Gezetgebungstheorie</i> dan <i>Gezetgebunglehre</i>	48
--	----

Tabel 2.1

Perkembangan Pengaturan Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	73
--	----

Tabel 2.2

Perbandingan pasal yang mengatur materi muatan.....	139
---	-----

Tabel 2.3

Perbandingan Pengaturan Materi Muatan Peraturan Daerah antara UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 10 Tahun 2004.....	149
--	-----

Tabel 2.4

Kategori Bidang Regulasi	155
--------------------------------	-----

Tabel 2.5

Jumlah regulasi yang dihasilkan di tingkat Pusat (Priode 2014-Oktober 2018)	156
---	-----

Tabel 2.6

Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional	173
--	-----

Tabel 2.7

Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Daerah	174
--	-----

Tabel 2.8

Perbandingan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Legislasi.....	177
--	-----

Tabel 2.9

Statistik Pembentukan Peraturan Menteri ESDM Pasca Perubahan UU Pemda201

Tabel 2.10

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.....211

Tabel 2.11

Kewenangan KLHK, Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perizinan222

Tabel 2.12

Peraturan Menteri KLHK.....224

Tabel 3.1

Program Penataan Regulasi Tahun 2018286

